

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. W. Widjaja, 2012, *Administrasi Kepegawian*, Jakarta: Rajawali.
- Diana Halim Koentjoro, 2012, *Hukum Admnistrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dwipayana dan Eko, 2013, *Membangun Good And Governance Di Desa*, Yogyakarta: nstitute And Reasearch Empowerment (IRE Press).
- Faisal Abdullah, 2011, *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- H.A.W. Widjadja, 2011, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Depok: Rajawali Pers.
- Irwansyah. 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jazim Hamidi, 2011, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendikia.
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Krisna Widya Wicaksono, 2011, *Administrasi Dan Birokrasi Pemerintah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- La Ode Ikhsanuddin Hamid, *Kabupaten Wakatobi dalam angka 2023*, Wakatobi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers.
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sastra Djatmika dan Marsono, 2009, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Bandung: Djambatan.

Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.

Sri Hartini, *et.al.*, 2010, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Hartini, 2012, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wasistiono, *et.al.*, 2010, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokusmesia.

Wijaya, 2012, *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Skripsi/Thesis

Malahayati. 2019. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terpidana Korupsi", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Alyadi Amrullah. 2018. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawarata Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Lare-Lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Robi Syafwar, 2017, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Di Kabupaten Agam", Thesis, Padang: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Rizki Firmansyah, 2018, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Atau Dewan Pengawas Di BUMN", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Dudus Misbahudin, 2021, "Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Studi Kasus Di Desa Sukamukti Kec. Bojongmangu Kab. Bekasi)". Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Banten.

Jurnal/artikel

Syamsul Bachri, Naswar dkk, 2019, "*Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa*", Al-Ishlah: Vol.21 No.2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Eka Merdekawati Djafar, 2014, "*Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Dian Haryani, 2015, "*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*", Jurnal Perspektif, Vol. 8, No. 1
- May Lim Charity, 2016, "*Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System)*," Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No. 01
- Christin Walukow, 2016, "*Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (Suatu Studi Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa)*", Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No. 7.
- Angga Prastyo, 2021, "*Dwi Fungsi Aparatur Sipil Negara Menjabat Badan Permusyawaratan Desa Ditinjau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)*". Jurnal Dinamika Hukum volume 12 no.3.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa